KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pengawasan radiasi nuklir, legislator desak BAPETEN proaktif
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pengawasan Radiasi Nuklir

Legislator Desak BAPETEN Proaktif

ANGGOTA Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyoroti pengawasan nuklir nasional menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kerusakan alat pemantau radiasi. Kondisi itu memicu keraguan terhadap rencana pengembangan energi nuklir.

Menurut Ateng, koordinasi pengawasan radiasi nuklir hingga kini belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari masih masuknya barang berbahaya dari luar negeri tanpa sertifikat keamanan. Semestinya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mampu memastikan keamanan setiap barang sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

"Barang dari luar masih masuk dan ketahuan setelah terjadi radiasi. Seharusnya barang berbahaya ini sebelum masuk ke Indonesia sudah ada sertifikat aman," ujar Ateng dalam RDP Komisi XII dengan BAPETEN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia mengungkapkan kekecewaannya terkait kerusakan alat pemantauan yang terkesan dibiarkan. Ditambah dengan temuan zat radioaktif ilegal, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan energi nuklir bisa semakin menurun.

"Ini mengurangi kepercayaan kami terhadap pengembangan energi nuklir ke depan. Padahal Presiden Prabowo Subianto mengharapkan nuklir jadi alternatif pertahanan energi kita," ucapnya.

Dia berharap, BAPETEN segera melakukan pembenahan internal, termasuk masalah profesionalisme dan integritas SDM. Baginya, kepercayaan masyarakat adalah kunci utama agar energi nuklir bisa diterima sebagai solusi energi di masa depan.

"Sehingga pemanfaatan energi nuklir ini bisa benar-benar diterima karena aman dan bermanfaat," katanya.

Anggota Komisi XII DPR Totok Daryanto menambahkan, BAPETEN harus mengge-


IG PRIBADI

Ateng Sutisna

ser paradigma pengawasan dari reaktif menjadi proaktif. Karena pengawasan yang baik seharusnya bersifat preventif agar bencana tidak perlu terjadi. Fungsi pengawasan bukan pemadam kebakaran atau sekadar mengatasi bencana.

Dia mencontohkan kejadian di Cikande, Banten, sebagai bentuk pengawasan yang reaktif. Tindakan baru diambil setelah adanya radiasi dari barang yang sudah masuk. Seharusnya, BAPETEN bisa mendesain sistem yang lebih tangguh, terutama menyongsong era Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Kami berharap BAPETEN bisa melakukan fungsi-fungsi yang sesuai, terutama terkait dengan rencana PLTN itu," ucap legislator Fraksi PAN itu.

Sejalan dengan rencana itu, Totok juga meminta BAPETEN memberikan penjelasan terbuka mengenai pilihan teknologi konstruksi. Harus ada pertimbangan efisiensi antara membangun dari awal di lokasi atau menggunakan desain prefabrikasi yang disiapkan di luar negeri dan tinggal dipasang di Indonesia.

"Di Indonesia sudah ada BATAN sejak 1958. Dengan modal itu, kemampuan kita seharusnya tidak kalah dengan negara lain," tegasnya.

Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin menegaskan, pengawasan zat radioaktif di Indonesia dilakukan secara menyeluruh, sejak digunakan hingga tidak lagi dipakai. Soal temuan Cs-137 di Cikande, dipastikan bahwa zat itu berasal dari kontaminasi, bukan dari sumber yang berada dalam pengawasan langsung BAPETEN.

"Karena itu, BAPETEN meminta Bea Cukai memasang alat pemantau radiasi di setiap pelabuhan untuk mendeteksi barang berbahaya," terangnya.

Terkait pengembangan energi nuklir, kata Zainal, Pemerintah tengah mempercepat pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (NEPIO). Saat ini, draf Perpres mengenai NEPIO sudah berada di Sekretariat Negara dan sedang menunggu keputusan resmi dari Presiden.

Pembentukan struktur ini, lanjutnya, agar seluruh Kementerian atau lembaga dapat berjalan selaras dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nuklir. "Selanjutnya, BAPETEN berperan sebagai pengawas utama di organisasi ini," pungkasnya. ■ PYB